

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah administrasi paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peranan dan posisi penting. Sebagai bagian dari sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah desa diharuskan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 67 tentang Desa.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa dipahami sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa desa memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal.² Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memegang peranan strategis sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan masyarakat, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 2024, 31.

² Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, dkk, “ Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indoensia” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (2024): 212-223. Hal. 213.

karena itu, pemerintah desa dituntut untuk memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Hal ini penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi di era modern menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dan bersaing secara optimal.

Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, dan kemajuan atau kemunduran suatu negara bergantung pada kualitas pendidikannya. Memperbaiki sistem pendidikan akan membuat sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama Pasal 10 dan 11, didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang mendorong peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi spritual, kecerdasan, kemandirian, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Hak pendidikan ini harus diberikan kepada semua warga negara, termasuk orang-orang suku laut.³

Suku laut merupakan salah satu kelompok etnis Melayu kuno yang menjalani kehidupan secara nomaden dan memiliki karakter budaya yang sangat berbeda sekali dengan masyarakat Melayu yang tinggal di bagian daratan. Satu keluarga menempati satu sampan kajang, yang beratapkan daun rumbia dan disebut “kajang”, sebagai rumah mereka di laut dan simbol kekeluargaan. Ketergantungan suku laut terhadap laut sangat tinggi, sehingga wilayah perairan dan pesisir menjadi lingkungan utama dalam kehidupan mereka yang masih sangat sederhana dan tradisional. Dari segi kepercayaan, sebagian besar masih menganut animisme,

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

namun ada juga yang telah memeluk agama Islam meskipun masih bercampur dengan kepercayaan leluhur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, komunitas ini telah mendapatkan bantuan melalui program Rumah Layak Huni sehingga mereka mulai menetap, seperti yang terjadi di Desa Temiang, Pulau Senang, Kabupaten Lingga. Sebagian anak-anak Suku Laut di Pulau Senang yang berada pada usia sekolah telah mengikuti pendidikan di tingkat SD dan SMP. Namun, hal tersebut belum mencerminkan keseluruhan kondisi mereka, karena masih banyak yang tidak melanjutkan sekolah bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan sarana seperti ketiadaan gedung sekolah di wilayah mereka, lokasi sekolah yang jauh dan berada di pulau berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat Suku Laut tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Upaya mereka dalam mengejar Pendidikan harus menempuh perjalanan sekitar 15 menit menggunakan sampan atau pompong menuju Desa Tajur Biru. Selain itu, dalam pendidikan yang formal dapat dinikmati anak-anak usia sekolah yang masih berada dalam jenjang Pendidikan, sementara Sebagian orang yang sudah dewasa masih memerlukan program pendidikan untuk mengurangi buta huruf di kalangan masyarakat Suku Laut. Proses penyadaran mengenai nilai dan urgensi pendidikan bagi mereka memerlukan waktu yang lama agar mereka bisa tertanam dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pendidikan di komunitas Suku Laut tidak dapat disamakan dengan

⁴ Marisa Elsera, "Social and Cultural Life of The Sea Tribe on Senang Island , Lingga Regency Kehidupan Sosial Dan Budaya Suku Laut Di Pulau Senang , Kabupaten Lingga," *Jurnal Masyarakat Maritim* (2022): 1-7. Hal. 4-5.

pendidikan di masyarakat desa karena mereka memiliki budaya dan cara hidup yang unik, yang membuat mereka layak disebut sebagai komunitas adat. Selain itu dalam memulai mengakses pendidikan formal, masyarakat Suku Laut juga sudah memanfaatkan layanan kesehatan, meskipun masih terbatas dan hanya dilakukan ketika kondisi sakit sudah cukup parah atau ketika persediaan obat di gereja tidak mencukupi. Hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, jarak pemukiman mereka yang sangat jauh dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, maupun pusku. Kedua, masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dukun atau bidan kampung dalam penyembuhan penyakit, sehingga mereka baru akan mencari pertolongan medis jika sakitnya sudah berat dan disarankan oleh dukun. Ketiga, keberadaan tenaga medis di pusku tidak selalu tersedia, sehingga menyulitkan masyarakat Suku Laut ketika membutuhkan layanan kesehatan.⁵

Walaupun pemerintah pusat telah menjalankan berbagai program serta adanya dukungan dari pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal, khususnya di Desa Temiang Pulau Senang, masih belum sepenuhnya terlihat. Penting untuk menelaah bagaimana Pemerintah Desa Temiang menjalankan perannya secara konkret, misalnya dengan menyediakan fasilitas transportasi seperti pompong yang diperuntukkan bagi masyarakat Suku Laut di Pulau Senang. Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut melalui judul: “Peran Pemerintah Desa Temiang Terhadap Pendidikan Suku Laut Di Pulau Senang Kabupaten Lingga”.

⁵ *Ibid* hlm, 6-7

Karena tidak ada faktor pendukung yang dapat mendorong mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, masyarakat Suku Laut masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Akibatnya, pemerintah Desa Temiang memiliki tugas yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Laut sehingga mereka dapat mengikuti kemajuan teknologi di era modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami semua kontribusi yang telah dilakukan Pemerintah Desa Temiang, serta bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak Suku Laut di Pulau Senang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Temiang dalam mendukung pendidikan masyarakat suku laut di Pulau Senang?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Temiang dalam meningkatkan upaya masyarakat suku laut di Pulau Senang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tentunya dalam sebuah penelitian terdapat beberapa tujuan tertulisnya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Mengetahui Peran Pemerintah Desa Temiang dalam mendukung Pendidikan masyarakat suku laut di Pulau Senang.
2. Mengetahui faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Temiang dalam meningkatkan upaya masyarakat suku laut di Pulau Senang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman penulis tentang Hukum Tata Negara, khususnya tentang Peran Pemerintah Desa Temiang dalam memberikan Pendidikan kepada masyarakat Suku Laut di Pulau Senang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan mendorong Pemerintah Desa Temiang untuk membuat kebijakan yang mendukung masyarakat Suku Laut di Pulau Senang, Kabupaten Lingga. Ini akan meningkatkan kemajuan dan mendorong anak-anak Suku Laut untuk melanutkan sekolah.